

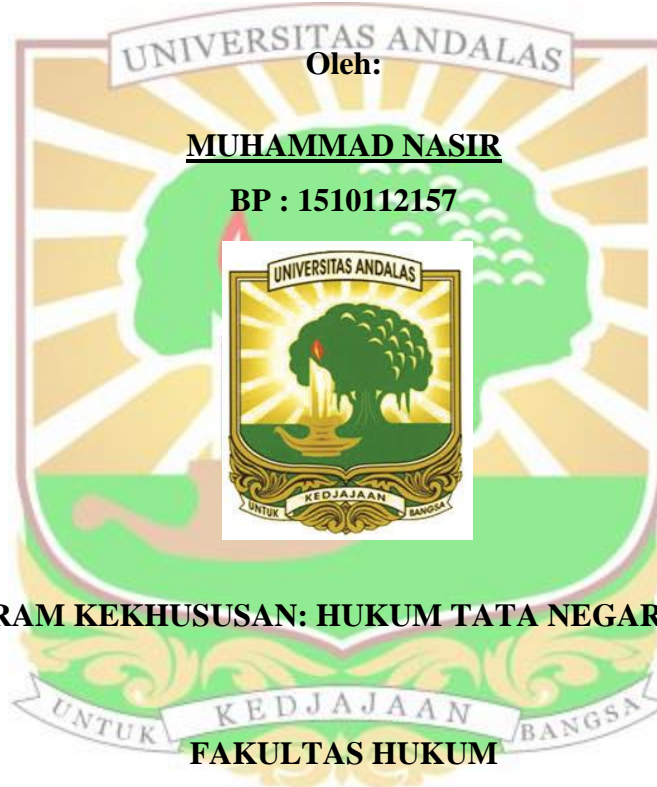
SKRIPSI

**KONSTITUSIONALITAS AMBANG BATAS PARLEMEN DAN RELEVANSINYA
DENGAN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA**

Pembimbing I : YUNITA SYOFYAN, S.H., MH

Pembimbing II : HENNY ANDRIANI, S.H., M.H

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan
Program Sarjana Hukum Universitas Andalas*




UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2020

No. Reg : 12/PK V/II/2020

| | | | |
|--|--|---|--------------------------------------|
|  | No. Alumni Universitas: | Nama Alumni: MUHAMMAD NASIR | No. Alumni Fakultas: |
| | a) Tempat/Tanggal Lahir : Malaysia, 27 Februari 1994 | f) Tanggal Lulus : 09 Juni 2020 | g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan |
| b) Nama Orang Tua : Mardas dan Neli Wati | h) Lama Studi : 4 tahun 11 Bulan | i) IPK : 3.80 | j) Alamat : Kabupaten Agam |
| c) Fakultas : Hukum | d) Program Kekhususan : Hukum Tata Negara | | |
| e) No. BP : 1510112157 | | | |

KONSTITUSIONALITAS AMBANG BATAS PARLEMEN DAN RELEVANSINYA DENGAN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA

(Muhammad Nasir, 1510112157, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 99 halaman Tahun 2020)


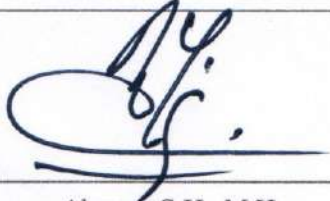
ABSTRAK

Pemberlakuan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) dalam tiga periode pemilihan umum terakhir yakni pemilihan umum tahun 2009, 2014 dan pemilihan tahun 2019 mendapat beragam reaksi di tengah-tengah masyarakat. Hal ini tercermin dari beberapa kali permohonan *judicial review* terkait muatan ketentuan ambang batas parlemen ke Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 menyatakan ambang batas parlemen untuk penentuan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat adalah konstitusional. Sistem pemerintahan presidensial dengan konsep multipartai yang diterapkan di Indonesia berdampak pada stabilitas politik yang rentan. Banyaknya fragmentasi partai di parlemen menyebabkan sistem pemerintahan presidensial berjalan tidak efektif. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul "Konstitusionalitas Ambang Batas Parlemen dan Relevansinya dengan Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia". Penelitian ini mengkaji *Pertama*, bagaimana konstitusionalitas ambang batas parlemen di Indonesia? *Kedua*, bagaimana relevansi ambang batas parlemen dengan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia? Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif, melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan ambang batas parlemen adalah konstitusional dan merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*), ambang batas parlemen juga memiliki relevansi dalam rangka agenda mewujudkan sistem multipartai sederhana dan agenda penguatan presidensialisme di Indonesia. Oleh sebab itu pembuat undang-undang harus merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada Pasal 414 ayat (1) dengan meningkatkan angka persentase ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*).

Kata Kunci : Pemilihan Umum, Ambang Batas Parlemen, Konstitusionalitas, Partai Politik, Presidensial

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus pada tanggal 09 Juni 2020
Abstrak telah disetujui penguji.

Penguji,

| | | |
|--------------|--|--|
| Tanda Tangan | 1.  | 2.  |
| Nama Terang | Delfina Gusman, S.H., M.H | Alysyan, S.H., M.H |

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Tata Negara : Arfiani, S.H., M.H


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas /Universitas dan mendapat nomor alumnus:

| | | |
|------------------------|-------|---------------|
| No. Alumni Fakultas | Nama: | Tanda Tangan: |
| No. Alumni Universitas | Nama: | Tanda Tangan: |